

BAB I

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan Principles for Responsible Investment (PRI) pada tahun 2005 yang menyoroti isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang biasa disebut Environment, (ESG) dan pada tahun 2015 PBB lebih lanjut mengumumkan 17 Sustainability Development Goals (SDGs) dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (Chang et al., 2021). Sejak saat itu, investor mempertimbangkan pedoman SDGs terkait pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan keputusannya dalam pasar keuangan (Plastun et al., 2020). Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan pedoman SDGs untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan baik di negaranya maupun di dunia (Yilmaz, 2021). Maka dari itu, saat ini perusahaan tidak hanya berfokus dalam peningkatan laba namun juga pada kepentingan seluruh *stakeholders*, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam setiap aktivitas bisnisnya. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan yakni lingkungan, sosial dan tata kelola atau biasa dikenal dengan sebutan Environment, Social and Governance (ESG) (Sharma et al., 2020). Pelaporan ESG sendiri telah meningkat secara drastis selama beberapa dekade terakhir (Abdul Rahman & Alsayegh, 2021) dan menyebabkan pengungkapan ESG menjadi bagian penting dari kebijakan strategis perusahaan (Malik et al., 2020). Informasi ESG yang berkualitas, akurat, relevan, dan andal serta dapat dibandingkan dan dilaporkan secara konsisten dalam laporan eksternal perusahaan menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan investor (de Silva Lokuwaduge & de Silva, 2020).

Urgensi pengungkapan ESG terbukti dengan banyaknya studi terdahulu yang meneliti mengenai hubungan antara berbagai kriteria ESG dengan kinerja perusahaan (Alsayegh et al., 2020). Namun, studi mengenai ESG lebih banyak berfokus pada negara maju di dunia, sedangkan kondisi di negara berkembang belum dieksplorasi secara mendalam (Atan et al., 2018) seperti AS, Eropa, dan Australia (Romano et al., 2020). Hal serupa juga disampaikan oleh Malik et al.

(2020), bahwa penelitian di negara berkembang masih sangat rendah, padahal pengungkapan ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik negara tersebut. Didukung oleh Mohammad & Wasiuzzaman, (2021), dari penelitiannya yang dilakukan di salah satu negara berkembang di Asia yaitu Malaysia mengatakan bahwa saat ini belum ada peraturan ketat tentang pengungkapan ESG di Malaysia. Sedangkan, negara maju seperti Amerika Serikat telah mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG tertentu walaupun sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat melaporkan ESG secara independen tanpa mengacu pada pedoman terperinci yang memberikan informasi standar untuk pemahaman pemegang saham. Di Eropa, komisi Eropa telah mengeluarkan arahan tentang pelaporan non-keuangan ESG dalam upaya mereka menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Beliau juga mengatakan pengungkapan ESG masih sangat baru di Malaysia, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana pengungkapan ESG harus dilakukan untuk berbagai industri di Malaysia. Pernyataan ini mendukung argumen yang menyatakan bahwa masih sedikit pemahaman bagaimana ESG harus diungkapkan khusus nya di Asia khususnya Asia Tenggara. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami pengungkapan ESG pada negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia terus mendorong keberhasilan prinsip ESG, terbukti dengan diluncurkannya indeks baru oleh Bursa Efek Indonesia yaitu IDX ESG Leadership pada Desember 2020. Seperti yang tercantum pada Lampiran Pengumuman BEI No.: Peng-00363/BEI.POP/11-2020, IDX ESGL mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Penilaian ESG dan analisis kontroversi dilakukan oleh Sustainalytics.

Pengungkapan ESG yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan oleh perspektif berkelanjutan. Dimana keputusan manajemen dan tujuan perusahaan serta tanggung jawab mereka menjuru kepada pemangku kepentingan. Dari perspektif ini, tata kelola perusahaan adalah salah satu mekanisme penting dalam menyeimbangkan semua kepentingan pemangku kepentingan, sehingga

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk makmur dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Faktanya, tata kelola perusahaan adalah serangkaian proses dan aturan yang mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan perusahaan. Secara umum, literatur tentang tata kelola perusahaan menunjukkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai kinerja perusahaan dalam jangka panjang termasuk dalam hal pengungkapan ESG (Merino et al., 2020). Maka dari itu, tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan kualitas pengungkapan ESG perusahaan (Kee et al., 2020). Menurut (Lu & Wang, 2021), dewan yang efisien membawa manfaat untuk meningkatkan ESG perusahaan. Maka, kepemimpinan perusahaan, khususnya dewan direksi, sangat penting dalam menyebarluaskan pelaporan keberlanjutan dan peran sentral dewan dapat mempengaruhi pengungkapan perusahaan (Hu & Loh, 2018). Secara umum, direksi perusahaan adalah badan yang menentukan kebijakan untuk manajemen perusahaan dan membuat keputusan tentang masalah-masalah besar perusahaan dan merupakan kendaraan utama untuk tata kelola perusahaan, bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan yang tepat dari pemangku kepentingan perusahaan melalui mengarahkan operasinya dan dengan mendukung pengambilan keputusan (Naciti, 2019).

Ukuran dewan direksi kemungkinan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas informasi ESG yang diungkapkan. Meskipun efektivitas dewan sangat tergantung pada kemampuan pribadi anggota dewan yang berkaitan dengan keterampilan strategis dan manajemen, sejumlah anggota dewan berbagi keterampilan yang berbeda akan menghasilkan keselarasan kepentingan yang lebih baik dengan tujuan perusahaan yang lebih baik (Rehman et al., 2021). Beberapa peneliti melaporkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR (Arayssi et al., 2020). Penelitian lain yang dilakukan oleh Alabdullah et al., (2019) juga menemukan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan dan pengungkapan CSR. Semakin besar ukuran dewan perusahaan, semakin banyak pengungkapan CSR yang akan diungkapkan perusahaan. Selain itu, adanya argument lain yang disampaikan oleh Tjahjadi et al., (2021), besar atau kecilnya dewan tidak akan mempengaruhi kinerja kelestarian

lingkungan ketika isu lingkungan tidak memberikan manfaat bagi perusahaan, sehingga tidak menjadi prioritas sehingga di Indonesia, ukuran dewan yang lebih besar memiliki efek negatif pada kinerja keberlanjutan sosial yang mungkin disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurangnya inovasi.

Indonesia merupakan negara yang menganut *two-tier system* (Tjahjadi et al., 2021), dimana kekuasaan CEO berbeda karena manajemen dan kontrol dipisahkan secara ketat oleh dewan manajemen dan dewan pengawas (Velte, 2020). Menurut (Velte, 2020), karakteristik individu anggota manajemen puncak, terutama chief executive officer (CEO) memiliki dampak yang besar pada pengungkapan ESG. Studi sebelumnya telah membahas dampak pendidikan CEO pada keputusan yang terkait dengan pengungkapan ESG. Tingkat pendidikan manajer yang lebih tinggi berkorelasi dengan inovasi yang lebih kuat dan kemampuan manajerial, beradaptasi dan mempelajari teknologi baru, menganalisis informasi dan kemampuan untuk memecahkan masalah (Harymawan, Nasih, et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Urquhart & Zhang, (2021), menemukan bahwa CEO dengan gelar PhD meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengendalikan biaya dan manajemen arus kas yang unggul. Dengan ini, argumen yang bisa dikatakan adalah adanya CEO dengan pendidikan lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas pengungkapan ESG karena lebih bisa mengendalikan biaya yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pengungkapan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang CEO-nya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan untuk berinvestasi lebih banyak dalam pengungkapan.

Remunerasi direktur merupakan isu penting yang erat terhubung dengan tata kelola perusahaan. Remunerasi harus mencerminkan kontribusi dewan terhadap kinerja perusahaan termasuk dalam pengungkapan ESG. Pengaturan kompensasi eksekutif perusahaan mendapat perhatian publik yang cukup besar dalam beberapa dekade terakhir karena hal tersebut merupakan kewajiban akuntabilitas terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan (Kanapathippillai et al., 2019). Remunerasi yang diterima oleh dewan direksi telah lama diperdebatkan oleh praktisi dan akademisi dalam kaitannya dengan hasil kinerja perusahaan dan fungsi

tata kelola karena seharusnya remunerasi dapat memotivasi para direktur agar dapat membatasi risiko serta membuat keputusan yang dapat mempengaruhi nilai serta pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Rehman et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Akter et al., 2020), menunjukkan bahwa gaji yang lebih tinggi kepada dewan tidak menjamin kinerja perusahaan yang lebih tinggi dan pada gilirannya mengakibatkan pemegang saham tidak mendapatkan imbalan apa pun dari ini. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Aslam et al., 2019), juga menunjukan hasil yang lemah antara hubungan kinerja perusahaan dengan gaji direksi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014, dewan direksi merupakan organ yang memiliki wewenang penuh untuk perusahaan.

Oleh karena itu penelitian ini ingin meneliti hubungan antara *Board Size*, *CEO Education* & Remunerasi Direksi dengan kualitas pengungkapan ESG. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang masuk dalam IDX ESGI sejak periode Q4 2020 sampai dengan Q3 2021 di Indonesia. Data akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang sebelumnya telah dilakukan uji normalitas untuk mengetahui normalitas data. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberi kontribusi pada kepustakaan yang terkait dengan ESG. Bagi perusahaan, penelitian ini dimaksudkan dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya dalam mengambil peran serta bertanggung jawab atas penerapan prinsip ini pada kegiatan bisnis perusahaan. Penerapan ESG dapat membuat perusahaan memiliki image yang baik karena seimbang dalam mementingkan *stockholder* dan *stakeholder*. Investor akan merespon dengan baik jika perusahaan dapat memperlihatkan potensi keberlanjutan serta dapat meminimalisir risiko.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan dan remunerasi dewan tidak berhubungan dengan kualitas pengungkapan ESG, tetapi latar edukasi CEO menunjukkan hubungan dengan kualitas pengungkapan ESG. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang edukasi CEO, dapat memberikan masukan serta pengambilan keputusan yang baik dalam meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Selain itu, tidak adanya hubungan antara ukuran dewan dengan kualitas pengungkapan ESG membuktikan bahwa ukuran dewan yang semakin besar belum tentu memberikan keuntungan dan juga dapat

menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi keputusan pengungkapan. Remunerasi yang dinilai dapat memberikan motivasi kepada para dewan agar mencurahkan seluruh kapasitasnya dalam pengungkapan ternyata pada hasil regresi menunjukkan bahwa hasil tidak signifikan.

Penelitian ini akan dijabarkan ke dalam lima bab yang akan dituliskan dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1 berisi pendahuluan mengenai latar belakang penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian. Bab 4 berisi hasil dan pembahasan hasil penelitian yang dirincikan Bab 5 berisikan kesimpulan dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.